



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WASIS JATMIKA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
3. NHK : 124747

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.340.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/70 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/70 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/60 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **239.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RG10 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BG6 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA STRET FIRE A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **30.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	557.691.009
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.167.191.009
III. HUTANG	Rp.	26.557.662
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.140.633.347

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.